

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A., Morissan M. dkk. 2017. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana.
- Adisasmita, Raharjo. 2013. Teori-teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anwar Sanusi. 2011. Metode Penelitian Bisnis. Salemba Empat. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
- BPKP. 2016. Pengelolaan Keuangan Desa. Edisi Kedua, Bogor : Penerbit Pusdiklatwas BPKP
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Edisi 7. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozie, Prita Hapsari. 2014. Make It Happen (Buku Pintar Rencana Keuangan Untuk Mewujudkan Mimpi). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 62
- Koontz, Harold & Cyril O'Donnel & Heinz Weihrich. 1986. Manajemen. Jilid 2. Terjemahan : Gunawan Hutaauruk. Jakarta: Penerbit Jakarta
- Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie, 2018. Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-keahlian. Edisi 6. Buku 2. Salemba Empat. Jakarta Selatan 12610
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung : Mandar Maju

- Suliyanto. 2006. Metode Riset Bisnis. Yogyakarta: Andi
- Suliyanto. 2018. Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis & Disertasi. Jakarta : Andi
- Widjaya, HAW. 2005. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang AsliBulat dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

PERATURAN-PERATURAN

- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Republik Indonesia.2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia.2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia.2005. Undang-undang No.72 Tahun 2005 tentang Alokasi Dana Desa. Lembaga Negara RI Tahun 2005, No.158. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia.2007. Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia.2014. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia.2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia.2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Republik Indonesia.2015. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan No. 43 Tahun 2004.
- Republik Indonesia.2016. Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentnag Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

JURNAL :

- Afifah Yeni Nur, 2019. Tinjauan Teori Perencanaan Dalam Pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana Desa. Jurnal Litbang Sukowati 1 ISSN : 2580-541X l e-ISSN : 2614-3356 20.
- Djaelani, Abd. Qadir dan Hisbul Manto. 2017. Analisis Perencanaa Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang). E-Jurnal Riset manajemen Vol. 06 No. 4 Agustus 2017
- Febrian. 2012. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 1 No. 2-Oktober 2014
- Ferdian,Tommy. 2019. Analisis Implementasi Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Mampun Baru Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin Jambi). Jurnal Akrab Juara Volume 4 Nomor 3 Edisi Agustus 2019 (128- 150)
- Icawati, Chichi Nani. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Jember Tahun Anggaran 2016. JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia) Vol. 3, No. 1
- Kadjudju Delyane et al, 2017. Analisis penerapan peraturan menteri dalam negeri No 113 Tahun 2014 dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDes. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(1), 2017, 160-168.
- Mamuaya Jeacklin Valenia et al, 2017. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No113 Tahun 2014. Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 1020 – 1030 ISSN:2303-1174.
- Nadirsya, dan Ridha Amalia. 2017. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No. 3, (2017) Halaman 121-132.
- Sinta P. Pratiwi, 2019. “Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan,

Pelaporan, Pertanggungjawaban APBDesa”. Skripsi. Surakarta: universitas Muhammadiyah

WEBSITE/INTERNET :

<https://www.beritasatu.com/nasional/563153/pengelolaan-dana-desa-dimuarojambi-banyak-menyimpang>

Kamus Besar Bahasa Indosesia. 2018. Defenisi pengelolaan
<https://kbbi.web.id/kelola>

Muhi, Ali Hanapiah. 2011. Fenomena Pembangunan Desa.
<http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/FENOMENA-PEMBANGUNAN-DESA.pdf>